

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana terorisme terhadap pelaku pada Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2020/ Pn. Jkt.Tim. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penjatuhan putusan pidana terhadap kasus nomor 831/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim berdasarkan pertimbangan yuridis tidak sesuai dengan pengaturan hukum positif di Indonesia sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang sehingga bertentangan dengan asas “*Lex Posterior Derogat Legi Priori*” dan pertimbangan non-yuridis meliputi keadaan yang memberatkan dan meringankan, tidak mempengaruhi hasil putusan tersebut. Sebagai saran atas kesimpulan tersebut diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam perundang-undangan karena dengan adanya dinamika hukum atas dibentuknya suatu peraturan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan yang baru diundangkan tersebut.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Terorisme*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the legal considerations made by judges in deciding cases of criminal acts of terrorism against perpetrators in Decision Number 588/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim and Decision number 831/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim. In discussing this study, the author applies a normative juridical research method with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials collected are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the imposition of a criminal verdict in case number 831/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim based on juridical considerations is not in accordance with the current positive legal arrangements in Indonesia, namely Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of the Criminal Acts of Terrorism, into Law so that it contradicts the principle of Lex Posterior Derogat Legi Priori and non-juridical considerations including aggravating and mitigating circumstances, do not affect the outcome of the decision. As a suggestion for this conclusion, synchronization and harmonization in legislation are needed because of the legal dynamics of the formation of a new regulation, causing some of these legal products to become disharmonious or out of sync with the newly promulgated regulations.

Keywords: *Judge's Consideration, Crime of Terrorism*